

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Integrasi sosial merupakan salah satu pilar fundamental bagi keberlangsungan dan stabilitas suatu masyarakat, khususnya yang majemuk seperti Indonesia. Secara sosiologis, integrasi sosial tidak hanya dimaknai sebagai absennya konflik, melainkan sebagai suatu kondisi dinamis di mana berbagai kelompok dalam masyarakat mampu membangun kohesi, saling percaya (*trust*), dan keteraturan melalui kesepakatan nilai-nilai bersama.¹ Hal ini sejalan dengan pandangan Lockwood yang menegaskan bahwa integrasi sosial mencakup dua dimensi: integrasi sistem (*system integration*) yang berkaitan dengan koordinasi antar bagian dalam sistem sosial, dan integrasi sosial (*social integration*) yang menyangkut hubungan harmonis antar aktor.² Dalam konteks Indonesia, integrasi sosial merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Namun, mencapai integrasi sosial dalam masyarakat majemuk bukanlah hal yang mudah. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dihadapkan pada realitas kemajemukan yang sangat kompleks. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat lebih dari 1.300 kelompok etnis yang tersebar di seluruh kepulauan,³ sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengidentifikasi lebih dari 700 bahasa daerah yang masih aktif digunakan.⁴ Kemajemukan ini diperkuat

¹ A. Susanto, *Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multikultural*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), p. 45; D. Mulyana, *Komunikasi dan Integrasi Sosial*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), p. 112

² D. Lockwood, *Integrasi Sosial dan Integrasi Sistem*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1964), p. 250

³ Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2010*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), p. 65 diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2010>

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Peta Bahasa*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019), p. 12

oleh keragaman agama, dengan enam agama yang diakui resmi dan puluhan aliran kepercayaan yang hidup dalam masyarakat.⁵

Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa integrasi sosial Indonesia menghadapi ujian yang semakin kompleks. Pertama, kesenjangan ekonomi yang terus melebar menciptakan disintegrasi struktural. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia masih berada pada level 0,38, dengan ketimpangan pengeluaran yang konsisten dalam dekade terakhir.⁶ Lebih memprihatinkan lagi, 1% populasi terkaya menguasai hampir 50% total kekayaan nasional, sementara 50% populasi termiskin hanya menguasai 5% total kekayaan.⁷ Ketimpangan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga geografis - pembangunan masih terpusat di Jawa dan Sumatera, sementara wilayah Indonesia Timur mengalami ketertinggalan yang signifikan.⁸

Kedua, politik identitas dan radikalisme keagamaan mengancam integrasi normatif. SETARA Institute dalam laporan tahunannya mencatat peningkatan 15% insiden intoleransi beragama dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 215 kasus yang didominasi oleh penutupan tempat ibadah, pembubaran paksa kegiatan keagamaan, dan ujaran kebencian.⁹ Fenomena ini menunjukkan bagaimana ruang publik semakin terkotak-kotak oleh klaim kebenaran absolut (*absolute truth claims*) yang tidak toleran terhadap perbedaan. Aspinall mencatat bahwa politik identitas telah menjadi alat mobilisasi yang efektif dalam kontestasi elektoral, namun berimplikasi pada penguatan sentimen primordial yang mengikis rasa kebangsaan.¹⁰

Ketiga, disrupsi digital dan maraknya disinformasi telah mempertajam polarisasi sosial. Penelitian Mastel (2023) mengungkapkan bahwa 87% netizen Indonesia terpapar hoaks, dengan isu SARA dan politik menjadi konten paling

⁵ Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2010*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), p. 89, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2010>

⁶ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), p. 8, diakses dari <https://www.bi.go.id>

⁷ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Laporan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia*. (Jakarta: TNP2K, 2023), p. 15, diakses dari <https://tnp2k.go.id/>

⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *Laporan Pembangunan Daerah Tertinggal 2022*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022), p. 23, diakses dari <https://www.bappenas.go.id>

⁹ SETARA Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2023*. (Jakarta: SETARA Institute, 2023), p. 7, diakses dari <https://setara-institute.org/>

¹⁰ Aspinall, E., *Politik dan Identitas di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019), p. 134

dominan.¹¹ Bias algoritmik pada platform media sosial menciptakan "ruang gema" (*echo chambers*) yang mempertajam perbedaan dan mematikan dialog antarkelompok.¹² Masyarakat semakin kesulitan membedakan antara fakta dan opini, antara bukti empiris dan narasi yang dikonstruksi untuk kepentingan tertentu.

Keempat, konflik agraria dan sumber daya alam terus menjadi sumber disintegrasi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2023 mencatat 241 konflik agraria yang mencakup area seluas 500.000 hektar dan melibatkan 100.000 kepala keluarga.¹³ Konflik antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah ini seringkali berlapis dengan sentimen etnis dan ketidakadilan struktural, menjadi bom waktu yang dapat meledak menjadi konflik horisontal terbuka.

Berhadapan dengan kompleksitas masalah ini, pendekatan integrasi yang bersifat koersif atau top-down melalui instrumen hukum dan kekuasaan negara saja terbukti tidak memadai. Pendekatan semacam ini mungkin efektif menekan gejala di permukaan, tetapi gagal menyentuh akar persoalan, yaitu rusaknya komunikasi dan hubungan sosial antarkelompok dalam masyarakat. Di sinilah teori Tindakan Komunikatif (*Communicative Action*) yang digagas oleh Jürgen Habermas menawarkan perspektif yang sangat relevan.

Habermas membedakan antara dua jenis tindakan rasional: tindakan yang berorientasi pada keberhasilan (*strategis*) dan tindakan yang berorientasi pada pemahaman (*komunikatif*). Menurutny, masyarakat modern mengalami "kolonisasi dunia-kehidupan" (*the colonization of the lifeworld*) oleh sistem (ekonomi dan birokrasi) yang hanya menjalankan logika efisiensi dan instrumental.¹⁴ Akibatnya, interaksi sosial yang seharusnya dibangun atas dasar pencarian pemahaman bersama (*mutual understanding*) melalui diskursus yang

¹¹ Mastel, *Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023*. (Jakarta: Masyarakat Telematika Indonesia, 2023), p. 12, diakses dari <https://mastel.id/>

¹² Nurhayati, S., & Putra, I. E., *Echo Chambers dan Polarisasi Media Sosial di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2020), p. 45

¹³ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2023: Konflik Agraria dan Darurat Reforma Agraria*. (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024), p. 3, diakses dari <https://kpa.or.id/>

¹⁴ J. Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif: Dunia-Kehidupan dan Sistem* (Jilid 2). (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1984), p. 196

rasional, justru direduksi menjadi transaksi strategis untuk memenangkan kepentingan tertentu.

Tindakan komunikatif mengandaikan adanya ruang publik (*public sphere*) yang ideal, di mana semua pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumennya (kesetaraan hak berbicara), bebas dari koersi dan manipulasi (keabsahan klaim), dan hanya mengakui otoritas argumen yang lebih baik (kekuatan argumen terbaik). Tujuan akhirnya adalah tercapainya konsensus melalui deliberasi yang rasional dan inklusif.¹⁵ Konsep ini menawarkan sebuah model integrasi sosial yang tidak dipaksakan dari atas, tetapi tumbuh dari bawah melalui proses dialog dan pembentukan kesepakatan bersama oleh para anggota masyarakat itu sendiri.

Relevansi teori Habermas dalam konteks Indonesia sangatlah signifikan. Nilai-nilai musyawarah untuk mufakat yang terkandung dalam Pancasila sejatinya sangat selaras dengan semangat tindakan komunikatif. Namun, dalam praktiknya, musyawarah seringkali dikalahkan oleh logika uang dan kekuasaan (politik transaksional), atau direbut oleh kelompok dengan suara paling vokal dan intoleran. Oleh karena itu, memahami disintegrasi sosial di Indonesia tidak cukup hanya dengan melihat faktor ekonomi atau politik, tetapi harus menyelami krisis komunikasi yang terjadi di tingkat masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini berargumen bahwa kerangka teori Tindakan Komunikatif Habermas memberikan perspektif kritis dan alat analitis yang memiliki kekuatan untuk mendiagnosis akar krisis integrasi sosial di Indonesia yang terletak pada kegagalan komunikasi publik yang rasional dan inklusif. Lebih jauh, teori ini juga menawarkan jalan alternatif untuk merajut kembali kohesi sosial dengan menjadikan ruang publik sebagai arena untuk membangun *mutual understanding* saling pemahaman, bukan sebagai medan perang merebut hegemoni. Penulis terdorong untuk memilih judul: “ **TEORI TINDAKAN KOMUNIKATIF JÜRGEN HABERMAS DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN INTEGRASI SOSIAL DI INDONESIA.**”

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam relevansi teori Tindakan Komunikatif Habermas terhadap persoalan

¹⁵ Ibid., p. 25-26

integrasi sosial di Indonesia kontemporer, dengan fokus pada tantangan yang ditimbulkan oleh kesenjangan ekonomi, politik identitas, dan disinformasi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu rekomendasi tentang bagaimana prinsip-prinsip tindakan komunikatif dapat dioperasionalkan untuk memperkuat integrasi sosial bangsa Indonesia di tengah gelombang perubahan dan disrupsi (gangguan atau kekacauan tatanan/kehidupan sosial) yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pertanyaan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, yakni bagaimana tindakan komunikatif dan upaya integrasi sosial di Indonesia? Pokok persoalan ini akan dijawab dengan tiga pernyataan penuntun berikut: pertama, apa arti tindakan komunikatif? Kedua, bagaimana kondisi integrasi sosial di Indonesia? Ketiga, bagaimana relevansi tindakan komunikatif upaya integrasi sosial di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa tujuan. Tujuan itu dibagi dalam dua bagian yakni, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui dan memahami persoalan integrasi sosial di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas dan menemukan relevansi teori tindakan komunikatif terhadap integrasi sosial di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Menurut Nazir, metode kepustakaan digunakan untuk “mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”.¹⁶ Penulis membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas. Selanjutnya penulis melakukan analisa terhadap tulisan-tulisan di dalam sumber-sumber itu, untuk menemukan hubungan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain berdasarkan tema-tema yang ada di dalam setiap bab dan sub-sub bab. Setelah menemukan hubungannya, penulis merangkaikan kalimat untuk menghubungkan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain, sehingga menjadi suatu tulisan yang terhubung satu satu sama lain dalam alur pemikiran yang logis.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal yang melatarbelakangi penulisan ini serta rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini. Bab II menguraikan tentang biografi Jürgen Habermas dan teorinya tentang tindakan komunikatif. Bab III tentang Integrasi Sosial di Indonesia, yang di dalamnya terdapat uraian yang berkaitan dengan kondisi dan tantangan integrasi sosial di Indonesia. Bab IV menguraikan tentang penerapan integrasi sosial di Indonesia. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pemanfaatan teori tindakan komunikatif di dalam kehidupan bersama demi terciptanya konsensus sehingga berkontribusi terhadap pembentukan integrasi sosial. Bab V merupakan penutup, dimana penulis mengurai penegasan-penegasan penting tentang relevansi teori tindakan sosial terhadap integrasi sosial.

¹⁶ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), p. 93